ANALISIS KETERSEDIAAN SARANA PRASARANA JALAN SERTA PENGAIRAN OLEH DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN KENDAL

SKRIPSI

Disajikan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang

oleh

Tiarna Wijayanti S.
3353404513

PERPUSTAKAAN
UNNES

FAKULTAS EKONOMI

JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke panitia sidang skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Dr. Etty Soesilowati, M.Si	Drs. Mudjijono, M.Si
NIP. 131 813 666	NIP. 130 795 079

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si
NIP. 131 993 879

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan panitia sidang ujian skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 26 Februari 2009

Penguji Skripsi

Prasetyo Ari Bowo, S.E, M.Si
NIP. 132 302 171

Anggota I

Dr. Etty Soesilowati, M.Si
NIP. 131 813 666

Anggota II

Drs. Fx. Sukardi
NIP. 130 521 374

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Drs. Agus Wahyudin, M.Si
NIP. 131 658 236

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2009

Tiarna Wijayanti S.
NIM. 3353404513

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

1. Trust yourself and you can change the world
2. You don't have to be the first but be the best
3. Meskipun aku berjalan di tengah-tengah kesulitan, cinta Tuhanku yang kekal berlangsung selamanya

PERSEMBAHAN :

1. Allah SWT
2. Superdad, mOm, Dix ita_nia dan Affiqy "m2" yang selalu memberikan doa & semangat
3. Keluarga besarku yang selalu mendukungku
4. Yummy Baby "ER" yang selalu menyayangi & mencintaiku (LuvU pok"n 4eva)
5. Sahabat-sahabatku d' cHe.a.cHe (Regina, Syahida dan Dewi)
6. 2nd Family d' Nouvira (Uty, Ibu, Jeung Pop, mb. Ima, depdipdop, Cueiy, Lek Du, Acica, dd' Gendoex, Ndoex kruchil)
7. Teman-teman seperjuangan EP '04
8. 3potLuvER 4eva

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan YME, sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan rintangan, terapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, kesulitan itu dapat teratasi untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih sedalam-salamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Agus Wahyudin, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
3. Drs. Bambang Prishardoyo, M.Si, Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan, yang telah memberi kemudahan administrasi dalam perijinan penelitian.
4. Dr. Etty Soesilowati, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
5. Drs. Mudjijono, M.Si selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi.
6. Dosen dan karyawan Jurusan Ekonomi Pembangunan Universitas Negeri Semarang yang telah memperlancar penyelesaian skripsi ini.
7. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal yang memberikan ijin dalam penelitian dan pengambilan data.

PERPUSTAKAAN UNNES

8. Teman-teman yang selalu memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini selesai.
9. Semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penelitian ini.

Kemudian atas bantuan pengorbanan yang telah diberikan, semoga mendapat berkah dari Tuhan YME. Penulis menyedari sepenuhnya dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan bagi mahasiswa Ekonomi Pembangunan pada khususnya.

Semarang, Februari 2009

Penulis

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

ABSTRAK

Tiarna Wijayanti S, 2009. "**Analisis Ketersediaan Sarana Prasarana Jalan Serta Pengairan Oleh Dinas Bina Marga Dan Pengairan Kabupaten Kendal".** 61 halaman. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang.

Kata Kunci : Ketersediaan Sarana Prasarana Jalan Serta Pengairan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis ketersediaan sarana prasarana jalan serta pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal berdasarkan variabel kondisi jalan dan kondisi pengairan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kajian dalam menilai ketersediaan sarana prasarana jalan serta pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten.

Fokus kajian adalah ketersediaan sarana prasarana jalan dan pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari dokumen. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif.

Hasil penelitian memperlihatkan kondisi jalan serta pengairan yang tiap tahun mengalami penurunan. variabel yang digunakan adalah ketersediaan sarana prasarana dengan indikator yaitu pertama kondisi jalan dengan parameter panjang jalan, kondisi jalan dan jenis jalan, indikator kedua kondisi pengairan dengan paramater jenis pengairan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa panjang jalan yang ada di Kabupaten Kendal selama tiga tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dan jalan aspal yang ada mengalami kenaikkan rata-rata 67.601 Km pertahun, namun kenaikkan tersebut tidak diimbangi dengan kondisi jalan baik yang tiap tahunnya malah mengalami penurunan rata-rata 64.797 Km pertahun. Jenis pengairan yang mengalami peningkatan hanya untuk jenis tersier sedangkan primer dan sekunder cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 3 tahun ini. Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan tiap tahunnya bersumber dari APBD Kabupaten dengan jumlah rata-rata 7.063 % dari total pengeluaran pemerintah. Pembiayaan untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan termasuk dalam belanja pelayanan publik di bidang belanja operasi dan pemeliharaan.

Simpulan dalam penelitian ini adalah jalan di Kabupaten Kendal sebagian besar sudah menggunakan aspal, dengan kenaikkan rata-rata pertahun 67.601 Km, namun kondisi jalan yang ada banyak mengalami kerusakan, penurunan kualitas ini panjang rata-rata pertahunnya adalah 64.797 Km. Dengan mengaji permasalahan diatas, diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya Dinas Bina Marga dan Pengairan lebih bisa meningkatkan kualitas jalan dan pengairan dengan bekerjasama dengan sektor swasta yang menanganii infrastruktur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
PENGESAHAN KELULUSAN iii
PERNYATAAN iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR vi
ABSTRAK viii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR LAMPIRAN xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 4
1.3 Tujuan Penelitian 4
1.4 Manfaat Penelitian 4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Otonomi Daerah 6
2.2 Pelayanan Publik 16
2.3 Infrastruktur 24
2.4 Kerangka Berfikir 30
BAB III METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian 32
3.2 Fokus Kajian 32
3.3 Objek Penelitian 32
3.4 Variabel Penelitian 33
3.5 Metode Pengumpulan Data 33
3.6 Metode Analisis Data 34

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1 Deskripsi Penelitian 35
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian 41
4.3 Pembahasan 51
BAB V PENUTUP
5.1 Simpulan 58
5.2 Saran 59
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN – LAMPIRAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR LAMPIRAN

Surat Rekomendasi 62
Surat Penelitian 63
Data Jalan dan Pengairan 67
Peraturan Bupati Kendal tahun 2007 70

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Jalan Kabupaten Kendal Tahun 2006-2008 3

Tabel 1.2 Kondisi Pengairan/ Irigasi Kabupaten Kendal Tahun 2006-2008 3

Tabel 4.1 Panjang Jalan Kabupaten Kendal 41

Tabel 4.2 Jalan Kabupaten Kendal Berdasarkan Kondisi 42

Tabel 4.3 Jalan Kabupaten Kendal Berdasarkan Jenis 44

Tabel 4.4 Pengairan Kabupaten Kendal Berdasarkan Jenis 45

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Ketersediaan Sarana Prasarana Jalan serta Pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal 31
Gambar 4.1 Proses Pelayanan Publik oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal 47
Gambar 4.2 Proses Pembiayaan Pelayanan Publik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal 48

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan bagi masyarakat Kota Kendal pada khususnya, 1 Januari 2001 merupakan saat yang ditunggu. Hari itu adalah hari peresmian diberlakukannya otonomi daerah secara penuh sebagaimana diatur dalam Tap MPR No. IV/MPR/2000. Pengalihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah masalahnya tidak cukup hanya berhenti pada pelimpahan wewenang saja tetapi ada tanggung jawab yang harus dilaksanakan yaitu kesejahteraan masyarakat.

Otonomi daerah adalah bagian dari demokratisasi, dengan demikian diharapkan tidak ada lagi cabang kekuasaan, lapisan kekuasaan, sekelompok orang, atau seseorang yang mengontrol secara monopoli. Kontrol terhadap kekuasaan di daerah harus dilakukan secara efektif. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam hal menyediakan barang publik (*public goods*) dan pelayanan publik (*service goods*). Agar *good governance* dapat berjalan dengan baik perlu keterlibatan semua pihak yaitu pemerintah dan masyarakat.

Di era otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan

pelayanan publik yang baik. Dengan pelayanan publik yang baik manfaat yang dirasakan adalah banyaknya investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Kendal sehingga akan secara tidak langsung akan menaikkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kendal. Peningkatan PDRB merupakan indikator besaran ekonomi dalam masyarakat yang secara langsung akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Salah satu infrastruktur yang penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan perekonomian adalah jalan dan pengairan. Semenjak adanya otonomi daerah Dinas Bina Marga dan Pengairan bertanggungjawab atas infrastruktur tersebut. Tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan antara lain meliputi peningkatan dan pemeliharaan jalan, peningkatan dan pemeliharaan jembatan serta peningkatan dan pemeliharaan pengairan. Peranan jalan dan pengairan sangat penting dalam kehidupan termasuk untuk mempermudah dalam menjalankan pemerintahan dan memperlancar kegiatan ekonomi. Dengan lancarnya kegiatan perekonomian secara tidak langsung akan dapat meningkatkan pendapatan daerah dengan demikian pendapatan masyarakat juga akan meningkat. Apabila hal ini dapat dicapai, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat.

Namun dalam kenyataannya tidak semua infrastruktur yang ada berjalan optimal termasuk jalan dan pengairan. Kondisi jalan dan pengairan yang ada malah dirasa kurang optimal, hal ini bisa dilihat dari kondisi jalan dan pengairan yang semakin menurun tiap tahunnya. Berikut merupakan data terbaru mengenai kondisi jalan dan pengairan Kabupaten Kendal dari tahun 2006 sampai dengan 2008 :

Tabel 1.1
Kondisi Jalan Kabupaten Kendal Tahun 2005-2008

Kriteria Jalan	Satuan	2005	2006	2007	2008
Jalan Baik	KM	401.65	391.65	357.98	207.258
Jalan Sedang	KM	280.3	281.30	254.01	200.635
Jalan Rusak Ringan	KM	206.58	143.58	336.76	164.07
Jalan Rusak Berat	KM	87.35	89.35	29.40	199.03

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Tabel 1.2
Kondisi Pengairan/ Irigasi Kabupaten Kendal Tahun 2005-2008

Jenis Irigasi	Satuan	2005	2006	2007	2008
Primer	Meter	31.980	31.980	71.751	29.948
Sekunder	Meter	192.510	192.510	155.747	181.237
Tersier	Meter	393.300	393.300	452.957	452.957

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Berdasarkan tabel 1.1 dan table 1.2 dapat diketahui bahwa sarana prasarana yang ada di Kabupaten Kendal terutama jalan dan pengairan masih kurang optimal. Dengan sarana prasarana yang kurang optimal akan mengakibatkan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat juga kurang optimal. Masalah lain yang akan timbul yaitu kurang lancarnya pemerintahan dan perekonomian karena terhambat oleh kondisi jalan dan pengairan yang semakin lama semakin menurun kualitasnya walaupun secara kuantitas jalan dan pengairan yang ada semakin bertambah. Apabila hal ini dibiarkan terlalu lama akan berdampak kepada sektor-sektor lain. Dengan demikian perlu adanya penanganan khusus terhadap kondisi jalan dan pengairan yang dalam hal ini dipercayakan kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal.

PERPUSTAKAAN UNNES

Berdasarkan uraian diatas, penulis bermaksud meneliti dan menganalisis tentang ketersediaan sarana prasarana dari Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal.

1.2 Perumusan Masalah

Bardasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Bagaimanakah ketersediaan sarana prasarana jalan serta pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai, sehingga akan memberikan arah yang tepat dan dapat dipakai sebagai pedoman untuk melakukan penelitian, yaitu :

Untuk mengetahui ketersediaan sarana prasarana jalan serta pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal.

PERPUSTAKAAN
UNNES

1.4 Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini merupakan satu kajian toeri oleh Mardiasmo mengenai ketersediaan sarana prasarana jalan serta pengairan.

2. Kegunaan Praktis

   a. Bagi instansi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau menambah pengetahuan tentang hal-hal yang berhubungan dengan ketersediaan sarana prasarana umum.

   b. Bagi penulis, penelitian ini merupakan salah satu pelatihan berpikir secara ilmiah dengan menganalisa data dari obyek yang akan diteliti.

   c. Bagi para akademisi dan pembaca, hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan atau perbandingan untuk memecahkan masalah-masalah yang serupa pada tempat lain.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Otonomi Daerah

Otonami daerah menurut UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan masyarakatnya. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan pemerintahan dan kepentingan masyarakat bersadarkan aspirasi masyarakat masing-masing daerah dengan tidak meninggalkan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

Pemerintah Daerah memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan, sekaligus sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah, Pemerintah Daerah berperan

menata kehidupan masyarakat dalam kerangka regulasi. Sedangkan sebagai penyelenggara utama pembangunan di daerah, Pemerintah Daerah berperan sebagai pelaksana dan penanggung jawab utama atas keseluruhan proses pembangunan yang dilaksanakan di daerah, yaitu dalam kerangka investasi, penyediaan barang dan pelayanan publik. Upaya menciptakan tata kepemerintahan yang baik, walaupun telah menghasilkan kemajuan di beberapa daerah, namun kita harus mengakui sejujur-jurnya bahwa di daerah lain hal ini belum sepenuhnya dapat diwujudkannya.

Pemerintah Daerah perlu mengambil langkah-langkah kreatif dan inovatif dalam menciptakan iklim yang kondusif, terutama pemerintahan, dan lingkungan ekonomi. Bila hal ini dapat dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah, maka akan tercipta lingkungan ekonomi yang kompetitif. Setiap wilayah atau daerah akan memiliki keunggulan tertentu yang dapat merangsang para pengusaha untuk berinvestasi. Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, merupakan dua sisi kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain. Performa pembangunan di daerah, sesungguhnya merupakan cerminan atas performa penyelenggaraan pemerintahan, begitu sebaliknya.

Dengan peningkatkan penawaran melalui peningkatan stok kapital pada gilirannya akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan *output* atau melakukan kegiatan-kegiatan produksi. Kegiatan produksi tersebut akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan proses tersebut pada akhirnya meningkatkan kualitas pembangunan ekonomi karena diversifikasi kegiatannya. Peningkatan nilai tambah perekonomian di daerah tersebut akan memberikan

dampak positif pada besaran balas jasa terhadap faktor-faktor produksi. Selain itu, meningkatnya intensitas perekonomian akan membuka peluang kerja bagi perekonomian dan penduduk di daerah sekitar penanaman modal. Dengan demikian, secara langsung dan tidak langsung akan terwujud efek *multiplier* terhadap kegiatan ekonomi dan pendapatan penduduk di kawasan-kawasan sekitar dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan daerah secara keseluruhan.

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

a. Perencanaan dan pengendalian pembangunan.
b. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang.
c. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
d. Penyediaan sarana dan prasarana umum.
e. Penanganan bidang kesehatan.
f. Penyelenggaraan pendidikan.
g. Penanggulangan masalah sosial.
h. Pelayanan bidang ketenagakerjaan.
i. Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah.
j. Pengendalian lingkungan hidup.
k. Pelayanan pertanahan.

Istilah otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani, "*outonomos/ autonomia*" yang berarti keputusan sendiri (Jatmiko, 2001 : 178). Sedangkan menurut Syarifudin (1985 : 203) istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atas kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas dan

kemandirian itu adalah perwujudan pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan sehingga sebagai hak untuk mengatur dan memerintah daerah sendiri, kemauan sendiri dan hak itu diperoleh dari pemerintah pusat.

Tujuan dari kebijakan otonomi daerah adalah :

a. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.
b. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari pemerintah pusat.
c. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing daerah. (Suparmoko, 2001 : 16)

Pemerintah melaksanakan kebijakan otonomi daerah dikarenakan beberapa sebab, yaitu pertama adanya kesulitan dalam dalam melaksanakan program pembangunan daerah secara efektif untuk negara yang sangat besar seperti Indonesia, kedua perlunya memasukkan pengalaman dan pengetahuan mengenai daerah ke dalam proses pembentukan atau pengambilan keputusan, ketiga kurangnya kesempatan pemerintah untuk terlibat dalam melaksanakan program pembangunan nasional. Dengan demikian pemerintah daerah harus dapat menyediakan barang dan jasa yang dampaknya bersifat lebih terbatas pada penduduk daerah masing-masing, seperti dalam hal penerangan jalan dan penyediaan lampu lalu lintas.

Otonomi daerah jika dilaksanakan secara efektif akan membantu kebutuhan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang disebabkan oleh perencana dan pengawasan pemerintah pusat atas kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial. Adapun keuntungan dari otonomi daerah adalah sebagai berikut :

a. Program-program pembangunan pemerintah dalam bidang ekonomi lebih diarahkan pada kepentingan lokal dan disesuaikan dengan daerah setempat.
b. Meningkatnya sistem administrasi daerah.
c. Meningkatnya demokrasi melalui partisipasi masyarakat secara langsung (Khusaini, 2006 : 85).

Otonomi daerah juga memiliki kelemahan, adapun kelemahan-kelemahan dari otonomi daerah antara lain :

a. Kurang efisien terkait dengan standarisasi terhadap *public service* dan jaringan antar daerah.
b. Mengakibatkan hilangnya *economic of scale* dan kontrol pemerintah terhadap sumber daya daerah.
c. Administrasi dan kepastian teknik yang lemah.
d. Pertanggungjawaban administrstif dilimpahkan kepada pemerintah lokal.
e. Sulitnya koordinasi dalam kerangka kebijakan nasional (Khusaini, 2006 : 86).

2.1.1 Kendala Otonomi Daerah

Dalam menjalankan otonomi daerah tidak seterusnya berjalan baik, setidak-tidaknya terdapat lima persoalan yang perlu dicermati secara kritis, yang diperkirakan bisa menjadi kendala dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dan perlu penanganan serius dari berbagai pihak. Kendala tersebut datang dari berbagai sektor, antara lain :

a. Menyangkut birokrasi pemerintahan. Dampak dari urusan pusat kepada daerah menyebabkan meningkatnya kebutuhan pegawai baru di daerah sehingga berakibat kenaikan volume pembiayaan daerah.
b. Sistem dan struktur politik. Karakter partai politik yang ada belum menunjukkan yang reformatif.
c. Mental aparat birokrasi pemerintah. Adanya ketimpangan antara pusat dan daerah selama ini tidak lepas dari mental aparat yang tidak lepas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
d. Restrukturisasi perekonomian nasional. Faktor ketimpangan nilai produksi antar daerah menjadi salah satu penyebab terkonsentrasinya pendapatan nasional di pusat atau kawasan perkotaan. Sehingga perlu adanya restrukturisasi perekonomian nasional dengan maninjau kembali kebijakan pemerintah yang menghambat nilai jual suatu produk.
e. Pembenahan sistem perbankan daerah. Investor erat hubungannya dengan perbankan, dengan kenaikan investasi secara langsung akan menaikkan PAD (Pendapatan Asli Daerah).

(Rochani, 2003 : 56-61)

Yang diharapkan dari otonomi daerah adalah otonomi yang memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan serta pentingnya memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional, artinya pelimpahan tanggung jawab akan

diikuti oleh pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya daerah serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Mardiasmo, 2004 : 83).

Menurut UU No.32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, prinsip otonomi daerah merupakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus pemerintahan yang ditetapkan dalam undang-undang. Kewenangan tersebut yaitu membuat kebijakan sendiri-sendiri untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu tujuan desentralisasi yang diakui secara universal berdasarkan undang-undang tersebut diatas adalah mendorong terciptanya demokratisasi dalam pemerintahan. Tujuan demokrasi akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat madani (*civil society*). Implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang efektif diharapkan mampu mendorong proses transformasi pemerintahan daerah yang efisien, akuntabel, responsif dan aspiratif

Reformasi pola kepemerintahan ini diharapkan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi, meskipun hal ini jelas melibatkan proses yang berjangka waktu lama. Dengan mendekatkan pengambilan keputusan ke masyarakat, perumusan strategi dan langkah-langkah pembangunan diharapkan lebih responsif menangkap kebutuhan ataupun isu yang berkembang. Bahkan,

dengan perspektif yang lebih demokratis tersebut, diharapkan nilai tambah ekonomi yang dihasilkan menjadi lebih tinggi dan manfaatnya dirasakan lebih langsung oleh seluruh masyarakat.

2.1.2 Pelaksanaan Otonomi Daerah

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah sebagai instrumen demokratisasi dan peningkatan kesejahteraan di tingkat lokal, telah disusun Strategi Besar (*Grand Strategy)* Pelaksanaan Otonomi Daerah dengan tujuan menjadi pedoman bagi pemerintahan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara efektif, efisien, ekonomis dan akuntabel. Elemen dasar pemerintahan daerah mencakup:

a. Urusan pemerintahan
b. kelembagaan
c. personil
d. perwakilan
e. keuangan daerah
f. pelayanan publik
g. pengawasan.

Penyelenggaraan pemerintah yang berkaitan dengan otonomi daerah yaitu :

a. Memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerahnya sendiri. Keleluasaan otonomi artinya mencakup kewenangan yang utuh dalam menyelenggarakan

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

pemerintahan termasuk penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.

b. Otonomi yang nyata, artinya daerah punya keleluasaan untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu yang secara nyata dibutuhkan.

c. Otonomi yang bertanggung jawab, sebagai konsekuensi dari pemberian hak dan kewajiban kepada daerah dalam pemberian pelayanan kepada publik dan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat daerahnya.

(Khusaini, 2006 : 75)

Keberhasilan pelaksanaan otonomi akan sangat tergantung pada desain, proses implementasi, dukungan politis baik pada tingkat pengambilan keputusan di masing-masing tingkat pemerintahan maupun masyarakat secara keseluruhan, kesiapan administrasi pemerintahan, pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia. Tujuan politis otonomi untuk meningkatkan tingkat tanggapan birokrasi terhadap keinginan masyarakat dalam pemenuhan pelayanan publik dikaitkan dengan partisipasi masyarakat.

Konsep pelaksanaan otonomi daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara kesinambungan fiskal (Wijaya, 2002 : 129).

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah harus malakukan pembinaan berupa pemberian pedoman seperti penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Pertanggungjawaban birokrasi di daerah diharapkan dapat diimplementasikan lebih baik dibandingkan dengan pusat. Dengan demikian indikator dalam pengukuran kinerja instansi pemerintah tersebut dapat diwujudkan yang pada akhirnya dijadikan instrumen baik dalam pelaksanaan otonomi daerah. Untuk mewujudkan otonomi daerah dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak yang terkait (*stakeholders*).

Otonomi yang diimplementasikan dengan efektif akan membantu kebuntuan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan yang sering disebabkan oleh perencanaan dan pengawasan pemerintah pusat atas kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial. Otonomi juga dapat membantu meringankan birokrasi pemerintah dan juga dapat mendorong aparat pemerintah daerah untuk lebih tanggap terhadap kondisi dan kebutuhan daerah.

Otonomi juga akan membantu pemerintah pusat dalam mengontrol dan mendeteksi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat lokal, mengetahui karakteristik masing-masing daerah baik dari aspek politik, budaya, etnik, agama dan ekonomi untuk kepentingan pengambilan keputusan. Otonomi dapat meningkatkan stabilitas politik dan keputusan nasional karena dengan adanya otonomi masyarakat lokal dapat mengontrol lebih baik atas penyediaan barang publik di tingkat lokal.

2.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik disebut juga pelayanan kepada masyarakat banyak, pelayanan sosial, pelayanan umum dan pelayanan prima. Pelayanan publik sebagai suatu proses kinerja organisasi, keterikatan dan pengaruh budaya organisasi sangatlah kuat. Apapun kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik haruslah berpedoman pada rambu-rambu aturan normatif yang telah ditentukan oleh organisasi publik sebagai perwujudan dari budaya organisasi publik.

Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa berhubungan dengan masyarakat yang memiliki keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Siapapun bentuk instansi pelayanannya, yang terpenting adalah bagaimana menberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan. Tetapi terkadang pelayanan publik yang diberikan dirasa kurang karena adanya ketidakdisiplinan dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri.

Penyelenggaraan kebijakan desentralisasi merupakan upaya nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemberian pelayanan umum yang lebih optimal. Sebagai acuan penyediaan pelayanan masyarakat, pemerintah daerah harus berpedoman kepada PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Dalam menyelenggarakan pelayanan publik, penyelenggara dalam hal ini pemerintah memiliki hak sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan pelayanan tanpa dicampuri pihak lain yang tidak memiliki tugas dan wewenang.
b. Menerbitkan peraturan perundang-undangan dan keputusan.
c. Mendapatkan anggaran pembiayaan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik.
d. Membela diri menghadapi keluhan dan tuntutan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
e. Menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan Undang-undang.

Berdasarkan prinsip pelayanan dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004, terdapat 14 unsur untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut :

a. prosedur pelayanan
b. persyaratan pelayanan
c. kejelasan petugas pelayanan
d. kedisiplinan petugas pelayanan
e. tanggung jawab petugas pelayanan
f. kemampuan petugas pelayanan
g. kecepatan pelayanan
h. keadilan mendapatkan pelayanan
i. ketepatan dan keramahan petugas
j. kewajaran biaya pelayanan
k. kepastian biaya pelayanan

l. kepastian jadwal pelayanan

m. kenyamanan lingkungan

n. keamanan pelayanan.

Masyakat sebagai penerima pelayanan mempunyai hak-hak yang harus disediakan oleh pemerintah, yaitu :

a. Mendapatkan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas dan tujuan pelayanan.

b. Mengetahui sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan.

c. Mendapat tanggapan atas keluhan yang diajukan secara layak.

d. Mendapatkan advokasi, perlindungan dan pemenuhan pelayanan.

Selain menerima hak, masyarakat juga memiliki kewajiban yang berhubungan dengan pelayanan publik, antara lain :

a. Mengawasi dan memberitahukan kepada penyelenggara untuk memperbaiki pelayanan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

b. Melaporkan penyimpangan pelaksanaan pelayanan kepada instansi terkait apabila penyelenggara tidak memperbaiki pelayanan sebagaimana dimaksud butir a.

c. Mematuhi dan memenuhi persyaratan, sistem dan mekanisme prosedur dalam mendapatkan pelayanan.

d. Menjaga dan turut memelihara berbagai sarana prasarana pelayanan umum.

e. Berpartisipasi aktif dan mematuhi segala keputusan penyelenggara.

Keberhasilan pelayanan publik sangat tergantung pada dua pihak yaitu birokrasi/instansi selaku pemberi pelayanan dan masyarakat sebagai yang diberi pelayanan. Dengan demikian untuk melihat kualitas pelayanan publik perlu diperhatikan dua aspek pokok, yaitu aspek proses internal organisasi dan aspek eksternal organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu untuk menaggulangi ketidaksempurnaan pelayanan publik, birokrasi atau instansi perlu melakukan beberapa perubahan sikap dan perilakunya antara lain : 1) Birokrasi harus lebih mengutamakan sifat pendekatan tugas yang diarahkan pada pengayoman dan pelayanan publik. 2) birokrasi perlu melakukan penyempurnaan organisasi yang bercirikan organisasi modern, ramping, efektif dan efisien. 3) Birokrasi harus mampu dan mau melakukan perubahan sistem dan prosedur kerjanya yang lebih berorientasi pada ciri-ciri organisasi modern yakni pelayanan cepat, tepat, akurat, efisiensi biaya dan ketepatan waktu. 4) Birokrasi harus memposisikan diri sebagai fasilitator pelayanan publik. 5) Birokrasi harus mampu dan mau malakukan transformasi diri dari birokrasi yang kinerjanya kurang baik menjadi organisasi birokrasi yang strukturnya inovatif dan responsif.

Cara memperbaiki pemerintahan agar lebih baik adalah adanya *reinventing government* dan penggantian sistem menjadi “layanan publik baru”. *Reinventing government* berarti penetaan ulang manajemen organisasi publik atau pemerintah sehingga dapat sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan layanan publik baru menurut Denhardt-Denhardt menekankan pada berusaha untuk menggunakan pendekatan sektor bisnis/ swasta dalam sektor publik Penataan ulang tersebut

dilakukan agar pemerintah mampu bekerja lebih progresif sehingga mampu bersaing dengan organisasi bisnis atau privat.

Program menyusun kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan potensi yang perlu dikelola melalui :

a. Penataan kelembagaan pemerintah daerah agar sesuai dengan beban pelayanan kepada masyarakat.
b. Peningkatan kinerja kelembagaan daerah berdasarkan prinsip-prinsip organisasi modern dan berorientasi kepada pelayanan kepada masyarakat.
c. Peningkatan hubungan kerja antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah agar tercipta kontrol dan keseimbangan dalam pelaksanaan pemerintah daerah.
d. Pengkajian secara mendalam terhadap standar pelayanan minimum dan penyediaan sistem informasi pelayanan kepada masyarakat.
e. Peningkatan peran lembaga non-pemerintah dan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan melalui penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sedangkan layanan publik baru lebih memfokuskan kepada :

a. Bagaimana pemerintah dapat menemukan beberapa cara untuk memberikan layanan berlebih dari basis pendapatan yang sama atau lebih kecil.
b. Bagaimana pemerintah dapat menggunakan gaya-pasar untuk menemukan kembali birokrasi

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

c. Bagaimana pemerintah dapat menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan warga negara (sekarang sering disebut sebagai konsumen) pilihan yang lebih besar di antara beberapa layanan.
d. Bagaimana pemerintah dapat membuat beberapa program yang lebih responsif.
e. Bagaimana pemerintah dapat memperbaiki kapasitasnya untuk merencanakan dan melacak kebijakan.
f. Bagaimana pemerintah dapat memfokuskan pada output dan outcome bukan proses atau struktur.

Layanan publik baru memiliki ide-ide yang diharapkan mampu mengubah pola pikir masyarakat, ide-ide tersebut antara lain :

a. Melayani masyarakat, bukan konsumen. Kepentingan publik merupakan hasil dari sebuah dialog mengenai nilai-nilai bersama, bukan kumpulan kepentingan individu.
b. Mencari kepentingan publik. Administrator harus memberikan kontribusi terhadap pembangunan gagasan kolektif bersama dari kepentingan publik. Tujuannya bukan untuk menemukan solusi tepat yang didorong oleh pilihan-pilihan individu. Tetapi merupakan penciptaan dari kepentingan dan tanggung jawab bersama.
c. Menilai penduduk lebih dari kewirausahaan. Kepentingan publik lebih baik dikembangkan oleh pegawai negeri dan penduduk yang berkomitmen untuk memberikan kontribusi bermakna kepada

masyarakat dibandingkan oleh manajer kewirausahaan yang bertindak seolah-olah uang publik adalah miliknya

d. Berpikir strategis, bertindak demokratis. Kebijakan dan program yang memenuhi kebutuhan publik bisa dicapai dengan paling efektif melalui usaha-usaha kolektif dan proses kolaboratif.

e. Menyadari bahwa akuntabilitas itu tidak sederhana: Pegawai negeri harus perhatian lebih dari perhatiannya terhadap pasar; mereka juga harus memenuhi hukum perundang-undangan dan konstitusional, nilai komunitas, norma politik, standar profesional dan kepentingan penduduk.

f. Melayani, bukan menyetir. Pegawai negeri harus menggunakan kepemimpinan berbasis-nilai bersama dalam membantu penduduk mengungkapkan dan memenuhi kepentingan bersamanya, dan tidak berusaha mengontrol atau menyetir masyarakat menuju arah baru.

g. Menilai orang, bukan hanya produktivitasnya. Organisasi publik dan jaringan yang menjadi tempat mereka berpartisipasi cenderung berhasil dalam jangka panjang jika dijalankan melalui proses kolaborasi dan kepemimpinan bersama yang didasarkan pada penghargaan terhadap semua orang

Dalam Layanan Publik Baru pemerintah memainkan sebuah peran penting dan aktif dalam menciptakan arena di mana penduduk melalui wacana dapat mengungkapkan nilai-nilai bersama dan mengembangkan sebuah rasa kolektif terhadap kepentingan publik. Administrator publik tidak hanya

merespons suara-suara berbeda melalui pembentukan kompromisasi, tetapi akan saling melibatkan penduduk agar mereka saling memahami kepentingannya dan pada akhirnya menggunakan pemahaman kepentingan komunitas dan masyarakat secara lebih luas dalam jangka panjang.

Investasi publik terutama jalan diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Pengeluaran untuk investasi publik harus mendapat perhatian yang lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran rutin, karena pengeluaran investasi memiliki efek jangka panjang sedangkan pengeluaran rutin lebih berdampak jangka pendek karena investasi publik bersifat menyeluruh. Dalam mengambil keputusan berinvestasi harus dengan pemikiran yang matang, apabila terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan akan berdampak pada anggaran tahun berjalan dan akan membebani anggaran tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah memiliki tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat (*public services*), pemberian pelayanan tersebut dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik (*charging for service*). Beberapa pelayanan yang secara langsung dibebankan kepada konsumen adalah penyediaan air bersih, transportasi publik, jasa pos dan komunikasi, energi dan listrik, perumahan rakyat, fasilitas rekreasi, pendidikan, jalan tol, irigasi, jasa pemadaman kebakaran, pelayanan kesehatan, pengolahan sampah/ limbah (Mardiasmo, 2002 : 107).

Dalam menjalankan pelayanan publik, sektor publik perlu diukur kinerjanya, hal ini dilakukan dengan maksud, pertama untuk membantu

memperbaiki kinerja pemerintahan, kedua untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan, ketiga untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Sedangkan tujuan dari pengukuran kinerja tersebut adalah untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan bawah serta memotivasi untuk mencapai *goal congruence* (kesesuaian tujuan), sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional (Mardiasmo, 2002 : 108).

2.3 Infrastruktur

Sejak krisis ekonomi pada pertengahan 1997, penyediaan dan pelayanan infrastruktur mengalami penurunan drastis, baik kuantitas maupun kualitas. Keterbatasan keuangan negara, dan pada saat yang sama prioritas pemerintah diarahkan untuk merestrukturisasi perbankan dan sektor keuangan serta program jaring pengaman sosial telah mengurangi kemampuan pemerintah untuk membangun, merehabilitasi dan memelihara infrastruktur. Infrastruktur yang buruk menghambat pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan beban masyarakat. Rehabilitasi, peningkatan infrastruktur yang ada, dan pembangunan infrastruktur baru, membutuhkan investasi yang sangat besar yang sangat sulit dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dan dunia usaha perlu ditingkatkan, khususnya pada proyek-proyek yang bersifat komersial dan

layak secara finansial. Upaya meningkatkan partisipasi swasta dalam pembangunan infrastruktur memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk tersedianya kerangka regulasi dan kelembagaan yang efektif dan menunjang. Iklim investasi yang lebih baik dan berkelanjutan juga harus diciptakan.

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk paling besar. Dalam posisi ini kebutuhan infrastruktur merupakan hal yang menjadi perhatian utama pemerintah. Karena pemerintah merupakan penyedia fasilitas publik yang tidak akan digantikan oleh sektor swasta. Indonesia sendiri masih sangat mengandalkan sektor publik dalam memperluas infrastrukturnya. Seperti yang diungkapkan oleh Keynes dalam bukunya Steven Pressman (2000 : 149) yang menyatakan bahwa pemerintah berperan serta dalam investasi publik seperti pembuatan jalan dan jembatan baru karena hal ini akan meningkatkan perekonomian. Dengan investasi yang tinggi, pertumbuhan daerah tersebut akan semakin tinggi.

Sedangkan menurut Samuelson dan Nordhaus (2001 : 40) peran pemerintah sangat besar dalam semua bidang. Pemerintah melakukan tugas sebagai tanggapan terhadap kekurangan-kekurangan dalam mekanisme pasar. Pemerintah menyediakan militer, polisi, pembangunan jalan raya dan lain sebagainya yang semua digunakan untuk masyarakat.

Salah satu syarat pokok pembangunan yaitu mobilitas faktor-faktor produksi. Dengan adanya mobilitas yang tinggi, pertumbuhan ekonomi daerah juga akan tinggi. Infrastruktur yang baik, merupakan salah satu pendorong mobilitas tersebut (Suryana, 2000: 34).

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah merupakan satu-satunya penyedia dan penyelenggara fasilitas publik termasuk infrastruktur yang semua digunakan demi kelangsungan hidup masyarakat. Pemerintah telah meluncurkan paket reformasi di bidang infrastruktur yang meliputi tiga elemen yang saling terkait, yaitu (1) menghilangkan segala bentuk monopoli dan menciptakan kompetisi yang sehat; (2) menghapuskan praktik diskriminatif yang menghambat partisipasi swasta; dan (3) reposisi peran pemerintah, di antaranya dengan memisahkan peran regulator dan operator. Elemen-elemen reformasi mencakup empat kerangka kebijakan yang termuat dalam paket kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu: (1) reformasi kebijakan lintas sektor strategis, (2) reformasi kebijakan sektor dan korporat serta restrukturisasi industri untuk meningkatkan kompetisi, (3) perbaikan regulasi untuk mencegah penyalahgunaan hak monopoli dan untuk melindungi konsumen dan investor, (4) penataan fungsi dan peran menteri/pimpinan lembaga/ kepala daerah sebagai regulator dan BUMN/BUMD sebagai operator.

Untuk menjalankan kerangka kebijakan tersebut pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut: (1) mengembangkan kerangka kebijakan, regulasi dan kelembagaan yang efektif; (2) reformasi sektor-sektor yang meliputi transportasi darat perkeretaapian, transportasi laut, transportasi udara, jalan tol dan nontol; infrastruktur energi; kelistrikan; pos dan telekomunikasi; air minum, sanitasi, perumahan, dan sumber daya air; (3) mendorong partisipasi pemerintah daerah; dan (4) merealisasikan transaksi proyek-proyek pembangunan infrastruktur.

Fasilitas-fasilitas tersebut tidak akan dapat digantikan oleh sektor swasta ataupun perorangan karena sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mensejahterakan rakyatnya. Dengan infrastruktur yang baik akan mendorong kegiatan ekonomi di semua daerah baik di perkotaan maupun di pedesaan. Manfaat yang bisa dirasakan dengan infrastruktur yang baik terutama jalan dan jembatan adalah lancarnya arus transportasi, karena membuat masyarakat dekat kepada pasar dan pelayanan serta kekuasaan yang mereka butuhkan untuk keperluan produktifitas, selain itu ialah semakin banyaknya investor yang masuk untuk menanamkan modalnya sehingga pertumbuhan ekonomi bisa meningkat. Infrastruktur yang dibangun bisa membuka kesempatan-kesempatan ekonomi. Tetapi ditengah kehidupan masyarakat sekarang ini dirasa mutunya masih rendah.

Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan, yaitu :

a. Kemacetan lalu lintas, seperti diketahui bahwa kemacetan lalu lintas akan meningkatkan biaya finansial (*financial costs*) misalnya bensin yang harus dikeluarkan tiap perjalanan serta biaya waktu (*time costs*) karena semakin banyak waktu yang yang digunakan untuk perjalanan.
b. Kebisingan dan pencemaran udara, dengan dibangunnya jalan akan semakin banyak kendaraan yang melintasi daerah tersebut, dengan demikian akan menyebabkan terjadinya pencemaran udara dan kebisingan atau polusi udara.
c. Dampak terhadap kecelakaan lalu lintas, karena tidak semua jalan memiliki kualitas kelayakan yang bagus, dengan semakin banyaknya

kendaraan yang melintasi jalan akan beresiko terhadap kecelakaan lalu lintas.

d. Dampak terhadap ganti rugi harga tanah, pembangunan jalan yang memerlukan perluasan biasanya menggeser lahan yang sudah ada, biasanya harga ganti ruginya akan mahal.

e. Dampak terhadap pemukiman kembali, biasanya dengan adanya pembangunan jalan, pemerintah harus menyediakan lokasi pemukiman baru untuk penduduk yang dipindahkan karena adanya proyek pembangunan jalan.

(Suparmoko, 2001 : 161-163)

Dengan pembangunan infrastruktur jalan dampak positif yang akan dirasakan oleh masyarakat adalah :

a. Nilai tanah, biasanya nilai tanah dan bangunan akan menjadi lebih tinggi dengan adanya pembangunan jalan. Harga tanah yang tadinya sangat rendah karena belum ada jalan akan berubah menjadi sangat tinggi nilainya setelah ada jalan yang melewati daerah tersebut.

b. Penghematan waktu, waktu perjalanan akan semakin hemat untuk mengangkut barang dan penumpang.

c. Kegiatan ekonomi, dengan pembangunan jalan akan banyak kegiatan ekonomi yang diuntungkan, permintaan jasa atau pelayanan oleh kendaraan bermotor serta pemenuhan kebutuhan penumpang yang menggunakan kendaraan pasti meningkat, sehingga ini berarti

terbukanya peluang-peluang baru dalam berusaha dan dapat meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan daerah.

(Suparmoko, 2001 : 64-165)

Terdapat bukti yang kuat bahwa investasi infrastruktur membuka kesempatan bagi orang-orang dan masyarakat, dengan menggabungkannya ke dalam sistem produksi dan perniagaan dalam lingkup regional dan nasional, dan juga melalui proses perbaikan akses pelayanan umumnya. Perbaikan infrastruktur yang lebih baik dapat mengurangi biaya transaksi, memperluas akses ke pasar, dan memperbaiki tingkat pendapatan penduduk. Investasi di sektor pembangunan (jalan) yang kuat di Indonesia selama lebih dari tiga puluh tahun ini telah membantu masyarakat untuk memasuki ekonomi pasar. Banyaknya jalan-jalan yang dibuat juga meningkatkan jumlah lapangan pekarjaan di sektor pekerjaan umum, dan menyadiakan pekerjaan untuk mereka yang tidak memiliki keterampilan. Keterlibatan masyarakat dapat membantu pengawasan yang sesuai (The World Bank, 2006: 277).

Investasi infrastruktur (jalan, jembatan, gorong-gorong dan irigasi) telah memperbaiki kegiatan di pedesaan maupun di perkotaan baik di sektor agrikultural maupun non agrikultural. Investasi infrastruktur (khususnya jalan) yang sudah mencapai ke tingkat pedesaan merupakan suatu contoh bahwa perluasan akses infrastruktur dapat berguna dalam rangka mencapai kesetaraan dan efisiensi untuk jangka waktu yang lama.

2.4 Kerangka Berfikir

Setelah adanya otonomi tiap daerah mulai mengatur pemerintahannya sendiri, termasuk dengan pemerintah Kabupaten Kendal yang sudah mulai menjalankan pemerintahannya sendiri termasuk didalamnya menyadiakan infrastruktur. Selain menyediakan infrastruktur sendiri, Pemerintah Daerah juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada warganya.

Dinas yang ada juga dibatasi setelah adanya otonomi daerah, di Kabupaten Kendal sekarang ini hanya memiliki 9 Dinas. Termasuk Dinas Pekerjaan Umum yang sekarang di bagi menjadi 2 yaitu Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang. Tetapi untuk urusan penyediaan infrastruktur jalan serta pengairan menjadi tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Pembangunan sarana prasarana yang memadai untuk memenuhi dan melengkapi ketersediaan sarana yang diperlukan masyarakat adalah sangat perlu untuk menunjang proses pembangunan suatu daerah. Tugas dari pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan serta pengadaan sarana prasarana kepada masyarakat, sehingga dengan demikian pembangunan yang diharapkan dapat tercapai.

Dalam rangka memperlancar arus lalu lintas dan transportasi guna mengembangkan pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Kendal, diperlukan prasarana yang nyaman dan memadai berupa jalan serta pengairan yang memenuhi kualitas baik. Jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan darat yang merupakan unsur utama, sehingga transportasi dapat berjalan lancar, dengan

demikian tingkat perkembangan daerah dapat merata dan seimbang. Namun selama 3 tahun terakhir ini kondisi jalan serta pengairan semakin menurun kualitasnya sehingga perlu penanganan yang serius dari pemerintah yang kemudian akan dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Ketersediaan Sarana Prasana Jalan Serta Pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal

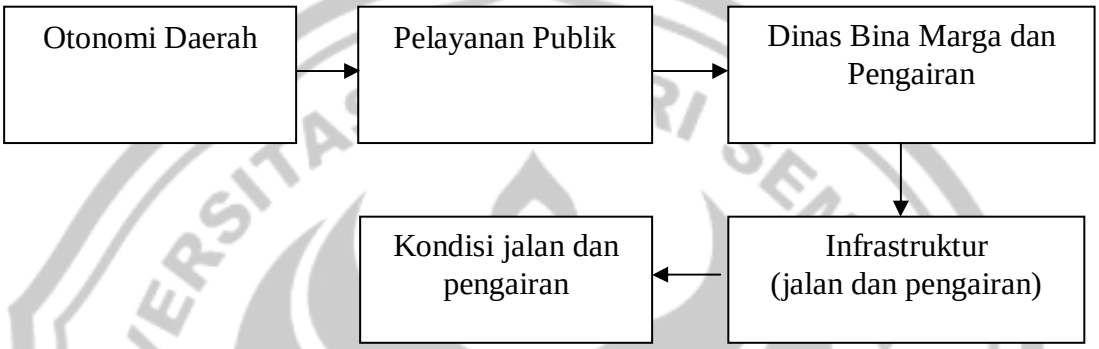

PERPUSTAKAAN UNNES

BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Pearson penelitian adalah pencarian atas sesuatu (*inquiry*) secara sistematis dengan penekanan bahwa ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan (Nasir, 1998 : 13). Tujuan utama dari penelitian adalah untuk memecahkan masalah, langkah-langkah yang ditempuh harus relevan dengan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam setiap malaksanakan langkah tersebut harus dilakukan secara obyektif, rasional dan menghindarkan cara berpikir yang mengarah coba-coba (*trial and error*). Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif.

3.2 Fokus Kajian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajian adalah ketersediaan sarana prasarana jalan serta pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal.

PERPUSTAKAAN
UNNES

3.3 Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini diantaranya adalah kondisi jalan dan kondisi pengairan di Kabupaten Kendal oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten kelembagaan dan bukan orang perorang.

3.4 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang dimaksud disini adalah variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006 : 32). Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketersediaan sarana prasarana jalan serta pengairan, indikatornya adalah :

- Kondisi jalan, dengan parameter :
  a. panjang jalan
  b. kondisi jalan
  c. jenis jalan
- Kondisi pengairan, dengan parameter :
  a. jenis pengairan

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik dan lain-lain sehingga lebih informatif bagi pihak lain. Data sekunder digunakan peneliti untuk di proses lebih lanjut. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan berupa metode dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data mengenai kondisi jalan serta pengairan serta peraturan daerah Kabupaten Kendal. Data diperoleh dari Dinas Bina Marga dan Pengairan, BPS serta Bapeda Kabupaten Kendal.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

3.6 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah metode statistik deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penyajian data dalam penelitian malalui tabel (Sugiyono, 2006, 142).

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Kendal

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang berada di Jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). Secara geografis wilayah Kabupaten Kendal terletak di antara 109^0 40'-110^0 18' BT dan 6^0 32'-7^0 24' LS dengan batas-batas wilayah :

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kota Semarang
- Sebelah selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung
- Sebelah barat : Kabupaten Batang

Dari segi ketinggian tanah dari permukaan laut, wilayah Kabupaten Kendal dapat dibagi menjadi 2, yaitu

- Wilayah utara : merupakan dataran rendah ketinggian antara 0 – 10 m berada linier memanjang di daerah Pantura.
- Wilayah selatan : merupakan daerah tanah pegunungan dengan ketinggian sampai dengan 2.579 m.

Kondisi geografis Kabupaten Kendal sangat bervariasi. Di sisi utara terdapat laut yang sangat kaya akan hasil laut yang siap dieksplorasi disamping itu area pertambakan yang berpotensi untuk meningkatkan

pemenuhan kebutuhan akan protein hewani (terutama ikan dan udang) dan sangat berpotensi untuk mengembangkan pertanian dan perkebunan, seperti tembakau, kayu sengon, teh, karet, peternakan ayam dan lain-lain.

Visi Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2006 – 2010 adalah : "Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, pengembangan dan pemerataan pemanfaatan sumber daya alam, terwujudnya *Good Governance* dan *Clean Government* yang bebas KKN, dan penegakan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia".

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dilaksanakan adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin, mandiri, dalam suasana aman dan damai.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, berdaya saing, inovatif berdasarkan iman dan taqwa.
3. Mengoptimalkan pengembangan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan.
4. Mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government* yang bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).
5. Menegakkan supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia.

Program pokok pembangunan di Kabupaten Kendal yaitu, pertama program peningkatan prasarana dan sarana daerah, meliputi meningkatkan prasarana jalan dan transportasi darat, meningkatkan penyediaan tenaga listrik, pembangunan jaringan telekomunikasi, meningkatkan pelayanan jasa pos dan giro, pemantapan prasarana pengairan. Kedua program pengembangan dunia

usaha, meliputi memberikan kemudahan perijinan bagi investor yang akan menanam modal, dukungan dana dan perbankan, mendata segala potensi yang ada untuk dimanfaatkan baik sumberdaya manusia dan alamnya. Ketiga program penataan ruang daerah. Keempat program pengembangan kawasan andalan dan sektor unggulan. Kelima program pembinaan kualitas lingkungan hidup. Keenam program peningkatan kesejahteraaan masyarakat.

Dari sisi kelembagaan, Bupati kendal mengeluarkan Peraturan Bupati Kendal No. 104 Tahun 2007 yang berisi tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), peraturan dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 3003 yang mengatur tentang batasan jumlah Dinas di setiap kabupaten maksimal 14 dinas, sedangkan jumlah badan dibatasi maksimal 8 badan. Dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tersebut juga mengatur jumlah pejabat esselon di bawah kepala dinas maksimal 4 jabatan struktural eselon III.

Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Fungsi Dinas Daerah Kabupaten/Kota yaitu perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya.

Seiring dengan berjalannya otonomi daerah, pemerintah mengaluarkan PP No. 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota serta PP No. 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah. Kedua paraturan tersebut manimbulkan berbagai variasi bentuk kelembagaan, antar satu daerah dengan daerah lain berbeda dalam melaksanakan peratutan tersebut. Hal ini dikarenakan persepsi dan kebutuhan dari satu daerah dengan daerah lain berbeda sehingga akan berbeda pula dalam tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Di Kabupaten Kendal sendiri sudah mulai menerapkan peraturan tersebut, terbukti dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Kendal No. 104 Tahun 2007. berdasarkan peraturan tersebut, Kabupaten Kendal hanya memiliki 9 dinas, yaitu 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 2) Dinas Kesehatan, 3) Dinas Bina Marga dan Pengairan, 4) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, 5) Dinas Kebudayaan dan Periwisata, 6) Dinas Peternakan, Kelautan dan Perikanan, 7) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 8) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 9) Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.1.2 Gambaran Umum Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal

Peraturan Bupati Kendal Tahun 2007 berisi tentang rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja jabatan struktural pada Dinas Bina Marga Dan

Pengairan Kabupaten Kendal menerangkan sebagai berikut Dinas Bina Marga dan Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang Pekerjaan Umum sub bidang Bina Marga dan Pengairan. Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya baik lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan fasilitasi operasional Bina Marga dan Pengairan dalam rangka pelaksanaan kegiatan bidang Pekerjaan Umum.

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas untuk merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dibidang urusan perencanaan, monitoring, evaluasi, kepegawaian dan keuangan. Tugas dari Sekretariat Dinas adalah pelaksanaan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas dan Sekretariat, pengelolaan administrasi umum, kepegawaian dan rumah tangga Dinas, pengelolaan asministrasi keuangan Dinas.

Bidang Bina Program dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan dibidang Bina Program yang meliputi survey dan perencanaan teknis, pengujian, dan evaluasi dan pelaporan. Kepala Bidang Bina Program

mempunyai tugas, pertama penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang survey dan perencanaan teknis, pengujian, evaluasi dan pelaporan. Kedua, pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan di bidang survey dan perencanaan teknis, pengujian, evaluasi dan pelaporan. Ketiga, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang survey dan perencanaan teknis, pengujian, evaluasi dan pelaporan. Keempat, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang survey dan perencanaan teknis, pengujian, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang kepala Bagian Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan di Bina Marga. Tugas dari Kepala Bidang Bina Marga adalah pertama, penyiapan penyusunan petunjuk teknis dan naskah dinas di bidang pembangunan jalan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan. Kedua, pengkoordinasian, pengembangan dan fasilitasi kegiatan dibidang pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan. Ketiga, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan. Keempat, pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang pembangunan dan peningkatan jalan, pembangunan dan peningkatan jembatan, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Bidang Pengairan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Kepala Dinas dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan di bidang Pengairan. Tugas Kepala Bidang Pengairan yaitu menyusun program kegiatan Bidang Pengairan berdasarkan evaluasi kegiatan tahun lalu, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber data yang tersedia sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan keciptakaryaan. Menyiapkan bahan rekomendasi perijinan yang berkaitan dengan pengairan.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa kondisi jalan yang ada di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1 Panjang Jalan Kabupaten Kendal

Panjang Jalan	Satuan	2005	2006	2007	2008
a. Nasional	KM	47.08	47.08	47.08	47.08
b. Propinsi	KM	98.00	98.00	98.00	98.00
c. Kabupaten	KM	598.35	598.35	598.35	770.993

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Jalan yang merupakan tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal adalah jalan kabupaten. Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa panjang jalan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak mengalami

peningkatan, namun di tahun 2008 panjang jalan bertambah 172.643 Km yang sebelumnya 598.35 Km menjadi 770.993 Km, hal ini terjadi karena dibukanya jalan baru yang tadinya masih berupa tanah kemudian menjadi jalan aspal. Jalan propinsi merupakan tanggung jawab Dinas Bina Marga dan Pengairan propinsi sedangkan jalan nasional menjadi tanggung jawab pusat. Diperkirakan dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil pada tahun 2009 panjang jalan kabupaten akan bertambah menjadi 736.4644 Km dan pada tahun 2010 panjang jalan kabupaten akan menurun menjadi 770.993 Km. Perkiraan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam menyelesaikan permasalahan panjang jalan.

Berikut dibawah ini merupakan kondisi jalan yang ada di Kabupaten Kendal berdasarkan kondisi jalan yang dikelompokkan dengan jalan baik, jalan sedang, jalan rusak ringan dan jalan rusak berat, yaitu :

Tabel 4.2 Jalan Kabupaten Kendal Berdasarkan Kondisi

Kondisi Jalan	**Satuan**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**
a. Jalan Baik	KM	401.65	391.65	357.98	207.258
b. Jalan Sedang	KM	280.3	281.30	254.01	200.635
c. Jalan Rusak Ringan	KM	206.58	143.58	336.76	164.07
d. Jalan Rusak Berat	KM	87.35	89.35	29.40	199.03

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kondisi jalan di Kabupaten Kendal tiap tahun selalu mengalami perubahan. Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui kondisi jalan baik dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 selalu mengalami penurunan. Tahun 2005 kondisi jalan baik sepanjang 401.65 Km, namun di tahun 2006 menurun 10 Km

menjadi 391.65 Km. Tahun 2007 kondisi jalan baik menurun 33.67 Km menjadi sepanjang 357.98 Km dan di tahun 2008 mengalami penurunan yang sangat tajam sepanjang 150.722 Km sehingga menjadi 207.258 Km. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan rata-rata penurunan kondisi jalan baik tiap tahun adalah sepanjang 64.797 Km. Diperkirakan dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil pada tahun 2009 kondisi jalan baik akan meningkat 92.6194 Km menjadi 229.8774 Km, namum pada tahun 2010 kondisi jalan baik akan menurun 39.4574 Km menjadi 190.420 Km.

Kondisi jalan rusak berat juga mengalami perubahan tiap tahunnya. Tahun 2005 kondisi jalan rusak berat hanya sepanjang 87.35 Km, namun pada tahun 2006 kondisi jalan rusak berat meningkat 2 Km menjadi 89.35 Km. Pada tahun 2007 kondisi jalan rusak berat menurun 59.95 Km sehingga kondisi jalan rusak hanya sepanjang 29.40 Km, namun pada tahun 2008 terjadi peningkatan sepanjang 169.63 Km, hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2008 kondisi jalan rusak berat bertambah menjadi 199.03 Km. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan rata-rata kenaikkan kondisi jalan rusak berat tiap tahun adalah 37.226 Km. Diperkirakan dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil pada tahun 2009 kondisi jalan rusak berat akan menurun 50.911 Km menjadi 148.119 Km namun pada tahun 2010 kondisi jalan rusak berat akan meningkat 16.541 Km menjadi 164,660 Km.

Berikut ini merupakan kondisi jalan berdasarkan jenis yang ada di Kabupaten Kendal, sebagian besar jalan sudah menggunakan aspal. Data yang diambil dari Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3 Jalan Kabupaten Kendal Berdasarkan Jenis

Jenis Jalan	Satuan	2005	2006	2007	2008
a. Aspal	KM	386.55	352.55	414.627	589.353
b. Hotmix	KM	67.30	67.30	67.30	75.44
c. Berbatu	KM	24.00	24.00	24.00	22.00
d. Kerikil	KM	22.00	66.00	66.00	61.00
e. Tanah	KM	98.50	88.50	24.423	23.20

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Jalan di Kabupaten Kendal berdasarkan jenisnya sebagian besar sudah menggunakan aspal. Hal ini dapat dilihat pada tabel diatas, aspal di Kabupaten Kendal tiap tahun cenderung mengalami kenaikkan. Tahun 2005 jalan aspal sepanjang 386.55 Km, tahun 2006 mengalami penurunan sepanjang 34 Km menjadi 352.55 Km. Pada tahun 2007 terjadi kenaikkan yang tajam sepanjang 62.077 Km sehingga menjadi 414.627 Km. Pada tahun 2008 terjadi kenaikkan lagi sepanjang 174.726 Km sehingga menjadi 589.353 Km. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan rata-rata kenaikkan jalan aspal tiap tahun adalah sepanjang 67.601 Km.

Jalan yang ada selain jalan aspal juga masih di beberapa tempat yang masih menggunakan jalan tanah. Kondisi jalan tanah pada tahun 2005 sepanjang 98.50 Km, pada tahun 2006 mengalami penurunan 10 Km menjadi 88.50 Km. Pada tahun 2007 mengalami penurunan 64.077 Km menjadi 24.423 Km kemudian pada tahun 2008 mengalami penurunan lagi sepanjang 1.223 Km menjadi 23.20 Km. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan rata-rata penurunan jalan tanah tiap tahun adalah sepanjang 25.1 Km.

Diperkirakan dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil pada tahun 2009 kondisi jalan aspal akan menurun 33.882 Km menjadi 555,471 Km namun pada tahun 2010 kondisi aspal akan meningkat 43.088 Km menjadi 598,559 Km. Kondisi jalan kerikil diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2009 meningkat 23.4 Km menjadi sepanjang 84,4 Km, dan pada tahun 2010 meningkat lagi sepanjang 12.4 Km sehingga menjadi sepanjang 96,8 Km. Kondisi jalan tanah pada tahun 2009 diperkirakan akan mengalami penurunan sepanjang 18.5785 Km sehingga menjadi 4,6215 Km, namun pada tahun 2010 jalan tanah di Kabupaten Kendal diperkirakan tidak ada lagi.

Berikut ini merupakan kondisi pengairan yang ada di Kabupaten Kendal. Pengairan yang ada dikategorikan dengan jenis primer, sekunder dan tersier. Kondisi pengairan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4 Pengairan Kabupaten Kendal Berdasarkan Jenis

Jenis Pengairan	Satuan	2005	2006	2007	2008
a. Primer	Meter	31.980	31.980	71.751	29.948
b. Sekunder	Meter	192.510	192.510	155.747	181.237
c. Tersier	Meter	393.300	393.300	452.957	452.957

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Kondisi pengairan (irigasi) di Kabupaten Kendal selalu mengalami perubahan tiap tahunnya. Pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 pengairan jenis primer sepanjang 31.980 M, pada tahun 2007 meningkat 39.771 Km menjadi 71.751 M, kemudian pada tahun 2008 menurun 41.803 Km menjadi 29.948 M. Hal ini juga terjadi pada pengairan jenis sekunder, pada tahun 2005 sampai

dengan tahun 2006 sepanjang 192.510 M, tahun 2007 menurun 36.763 M menjadi 155.747 M, namun pada tahun 2008 meningkat 25.58 M menjadi 181.237 M. Sedangkan pengairan jenis tersier tidak mengalami perubahan yang besar, pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 sepanjang 393.300 M, tahun 2007 dan 2008 panjang pengairan tersebut tidak mengalami perubahan yaitu sepanjang 452.957 M. Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan rata-rata perubahan pengairan primer tiap tahunnya adalah 27.191 M, rata-rata perubahan pengairan sekunder tiap tahunnya adalah 20.751 M, dan rata-rata perubahan pengairan tersier tiap tahunnya adalah 19.885 M.

Diperkirakan dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil pada tahun 2009 kondisi pengairan primer akan mengalami kenaikkan menjadi 50,2669 M dan pada tahun 2010 kondisi pengairan primer akan naik lagi menjadi 53,8646 M. Pengairan sekunder diperkirakan pada tahun 2009 akan mengalami penurunan menjadi 165,11 M, pada tahun 2010 pengairan sekunder juga akan mengalami penurunan lagi menjadi 159,179 M. Pengairan tersier pada tahun 2009 diperkirakan akan mengalami kenaikkan menjadi 470,854 M, pada tahun 2010 pengairan tersier juga akan mengalami kenaikkan menjadi 488,751 M.

Dinas Bina Marga dan Pengairan dalam menjalankan tugasnya akan selalu berhubungan dengan masyarakat. Berikut merupakan pelayanan yang diberikan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan kepada masyarakat melalui proses sebagai berikut :

Gambar 4.1 Proses Pelayanan Publik oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan

Sumber : Dinas Bina Marga dan Pengairan

Gambar diatas menjelaskan tentang proses pelayanan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang merasakan sarana prasarana jalan serta pengairan kurang optimal langsung malaporkan kepada Dinas Bina Marga dan Pengairan berupa lisan ataupun surat. Pengaduan tersebut diterima oleh Bagian Sekretariat (Kasi Humas), kemudian Kasi Humas mengolah dan mempelajari pengaduan tersebut. Setelah mengetahui inti dari pengaduan, Kasi Humas memberikan surat tugas yang dilampiri surat pengaduan ke masing-masing Kepala Bidang sesuai dengan jenis pengaduan yaitu kepada Kepala Bidang Bina Marga untuk pengaduan mengenai jalan dan jembatan atau kepada Kepala Bidang Pengairan untuk pengaduan mengenai pengairan/ irigasi. Setelah Kepala Bagian menerima surat tugas, langkah

selanjutnya adalah Kepala Bidang menugaskan staf sesuai dengan bidangnya. Tugas staf yaitu survey/ cek lapangan untuk mendata kerusakan atau yang bersifat mengganggu kepentingan umum, kemudian membuat perencanaan, menggambar dan menghitung sesuai dengan kebutuhan kerusakan yang ditanda-tangani oleh Kepala Dinas. Pelaksanaan dibiayai oleh anggaran rutin (pemeliharaan rutin) yang sumbernya dari APBD Kabupaten. Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan tiap tahunnya bersumber dari APBD Kabupaten dengan jumlah rata-rata 7.063 % dari total pengeluaran pemerintah. Pembiayaan untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan termasuk dalam belanja pelayanan publik di bidang belanja operasi dan pemeliharaan.

Berikut ini merupakan grafik proses pembiayaan pelayanan publik oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan :

Gambar 4.2 Proses Pembiayaan Pelayanan Publik Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal

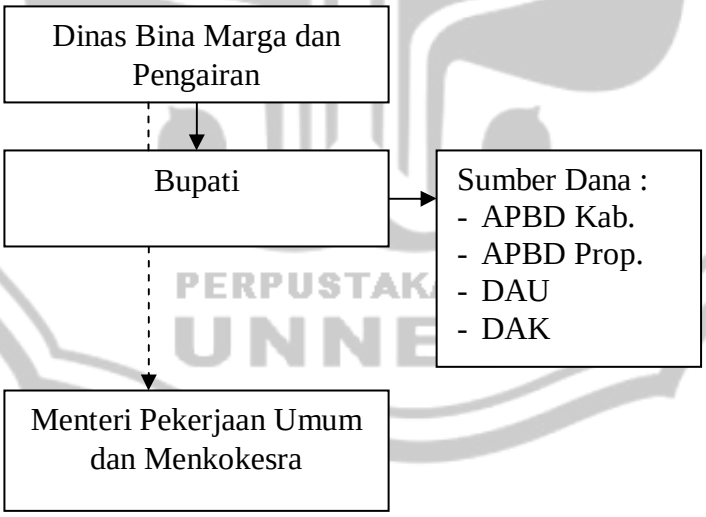

Keterangan :
→ : pembiayaan secara langsung
- - - - - - → : pembiayaan secara tidak langsung

Sumber : Dinas Bina Marga da Pengairan

Gambar di atas menjelaskan tentang proses pembiayaan pelayanan publik oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan. Dinas Bina Marga dan Pengairan selaku pelaksana pelayanan membuat laporan terinci yang ditujukan kepada Bupati dengan maksud meminta anggaran sesuai dengan laporan terlampir. Kebijakan/ Keputusan Bupati adalah penentu alokasi sesuai dengan usulan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan serta penentu anggaran biaya sesuai dengan usulan alokasi yang ditentukan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan. Dana diambilkan dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi, DAU dan DAK.

Dana yang diajukan kepada Bupati sudah ada, lokasi kerusakan langsung ditangani/ dikerjakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan tetapi apabila dana yang diajukan ke Bupati belum ada, Dinas Bina Marga dan Pengairan hanya menangani kerusakan tersebut yang bersifat sementara yang bisa melancarkan lalu lintas/ pengguna jalan dan pengguna pengairan/ irigasi, Bagian Bina Marga menangani kerusakan jalan dan jembatan sedangkan Bagian Pengairan menangani pengairan/ irigasi. Anggaran yang diminta kepada Bupati adalah untuk menangani kerusakan yang bersifat ringan atau sedang, sedangkan kerusakan yang bersifat berat atau bencana alam dilaporkan ke pusat, yaitu kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menkokesra dengan tembusan dari Gubernur Jawa Tengah.

Dana yang digunakan untuk pembuatan jalan, jembatan atau pengairan dalam pengerjaannya akan dilelangkan (tender), dengan minimal dana 40% pekerjaan bisa dilaksanakan. Pekerjaan yang akan dilelang diumumkan di kabupaten, dengan jadwal yang sudah ditentukan untuk masing-masing dinas termasuk untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan. Setelah ada persetujuan antara

pemenang tender dengan Dinas Bina Marga dan Pengairan, pekerjaan bisa langsung dilaksanakan. Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagai perancang dan pemenang tender sebagai pelaksana.

Tiap tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal mengaluarkan dana yang gunakan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal untuk pembiayaan survey dan perencanaan, pemeliharaan rutin, perbaikan, peningkatan, pembangunan, pengaspalan, normalisasi saluran, pemeliharaan saluran,. Berdasarkan Laporan Rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) diketahui jumlah anggaran yang dikeluarkan selama tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, yaitu tahun 2006 anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal sebesar Rp.84.832.078.000,00. Tahun 2007 anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal sebesar Rp.70.893.018.000,00. Tahun 2008 anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Kendal sebesar Rp.38.632.522.550,00. Anggaran tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan usulan Dinas Bina Marga dan Pengairan dan sesuai dengan pembelanjaan rutin pelayanan publik.

4.3 Pembahasan

Dengan dikeluarkannya peraturan otonomi daerah, tiap daerah memiliki kebebasan untuk malaksanakan pembangunannya. Seperti dengan Kabupaten Kendal, pembangunan daerah Kabupaten Kendal diarahkan untuk memacu

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prasarana dan peran serta aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam upaya pemerataan pembangunan diseluruh wilayah dan kawasan Kabupaten Kendal yang kurang berkembang dan terpencil perlu ditingkatkan lagi terutama di daerah pedesaan agar tidak muncul kecemburuan sosial dengan daerah di perkotaan serta hasil-hasil pembangunan dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat.

Pembangunan di Kabupaten Kendal diarahkan untuk mempertahankan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang melibatkan masyarakat setempat secara penuh, peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha, peningkatan kesempatan kerja bagi tenaga kerja setempat dan perbaikan kualitas angkatan kerja melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan produktivitas perekonomian daerah, penganekaragaman perekonomian daerah, peningkatan pertumbuhan ekspor non migas, peningkatan jumlah dan kualitas investasi swasta, peningkatan kesejahteraan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan, pengembangan sistem transportasi terpadu yang akan meningkatkan aksesibilitas daerah terpencil dan terbelakang, penguatan kelembagaan dan aparatur pemerintah di daerah dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pembangunan di daerah, pengembangan sumber daya alam yang memiliki potensi dan keunggulan komparatif dengan memperlihatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk pembangunan yang berkelanjutan, dan

pengembangan kawasan andalan dengan menciptakan keterkaitan wilayah sekitarnya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan di Kabupaten Kendal, hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah berfokus (lebih mengedepankan) pada pembangunan infrastruktur ekonomi (listrik, telekomusikasi, air, jalan, bendungan, irigasi). Dengan dipilihnya infrastruktur jenis ini adalah bahwa infrastruktur ekonomi ini akan meningkatkan aktivitas ekonomi, karena infrastruktur ini memberikan insentif atau daya tarik untuk melakukan kegiatan ekonomi dengan memberikan banyak fasilitas kemudahan berusaha (kegiatan ekonomi). Kegiatan ekonomi yang meningkat ini mempersyaratkan adanya peningkatan pada faktor produksi yang salah satunya adalah tenaga kerja. Dengan demikian, pengangguran pun akan mampu ditampung oleh penciptaan lapangan pekerjaan (permintaan tenagakerja) dari peningkatan kegiatan ekonomi tersebut.

Selain perannya sebagai pemberi bantuan (memfasilitasi), pemerintah juga memiliki kewajiban moral untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan melalui proses tersebut sepenuhnya sesuai dengan norma-norma keadilan dan kejujuran, dan dicapai melalui sebuah proses yang sepenuhnya sesuai dengan norma dan etika demokrasi. Pemerintah akan berperan dalam memfasilitasi solusi bagi masalah-masalah publik, tetapi juga bertanggung jawab dalam memastikan bahwa solusi-solusi tersebut sesuai dengan kepentingan publik baik dalam substansi maupun prosesnya

Melihat pada kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Kendal ini, dapat dikatakan bahwa kondisi tersebut menjadi salah satu faktor utama sedikitnya

investasi yang masuk. Infrastruktur adalah salah satu indikator teratas yang menentukan keputusan untuk berinvestasi selain kondisi makro ekonomi, kematangan institusi (KKN/ pungli/ Ijin), kondisi ketenagakerjaan. Dengan demikian hal utama yang harus dilakukan pemerintah Kabupaten Kendal adalah perbaikan infrastruktur terutama jalan.

Permasalahan infrastruktur yang terjadi sekarang ini meliputi : pertama, menurunnya belanja untuk infrastruktur karena keterbatasan dana. Kedua, rendahnya kinerja infrastruktur. Ketiga, rendahnya tingkat recovery infrastruktur. Keempat, kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah (pedesaan dengan perkotaan). Kelima, kesenjangan aksesibilitas infrastruktur. Keenam, inefisiensi penyediaan infrastruktur. Permasalahan-permasalahan inilah yang menghambat investasi untuk berkontribusi lebih besar pada pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih saja didominasi oleh konsumsi. Secara teoretis, masyarakat dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang melebihi peningkatan pertumbuhan penduduk dapat dikatakan bahwa pada masyarakat tersebut terjadi peningkatan kemakmuran.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan kegiatan ekonomi. Pada tahap akhir, hal tersebut akan menurunkan tingkat pengangguran dan tentunya kemiskinan. Dengan adanya program pembangunan infrastruktur dasar, sekaligus akan berhubungan dengan program pengentasan kemiskinan dan *employment creation* (penciptaan lapangan kerja). Jadi target yang dicari adalah pertumbuhan tetapi sekaligus menarik penciptaan

lapangan kerja. Salah satu lapangan kerja itu adalah pertanian. Contohnya adalah pembangunan irigasi, drainase, dan jalan-jalan pedesaan.

Investasi publik pada infrastruktur dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan mencapai pertumbuhan jangka panjang. Pengeluaran pemerintah dalam bentuk investasi dan kegiatan produktif dapat dijadikan sebagai penentu pertumbuhan jangka panjang. Peran infrastruktur jalan dalam pengurangan kemiskinan pada seluruh daerah di Kabupaten Kendal akan berhubungan langsung dengan orang miskin sering terkonsentrasi di pedesaan dan cenderung terisolasi dengan daerah lainnya, dengan demikian mobilitas mereka sangat terbatas.

Keterbatasan ini menyebabkan mereka tidak dapat mengambil keuntungan dari berbagai kesempatan tenaga kerja yang timbul dari proses pertumbuhan. Kemudian bagi pertanian, hal ini akan meningkatkan biaya produksi dan akibatnya menurunkan keuntungan mereka.

Dampak langsung dari infrastruktur jalan ini adalah tambahan dari lapangan pekerjaan ketika pembangunan jalan ini berlangsung, meningkatkan hubungan antara produsen dan konsumen, pencari kerja dengan yang mempekerjakan. Singkatnya, jalan dapat menyebabkan pasar input dan pasar barang bekerja lebih baik, yang secara tidak langsung mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain menyediakan infrastruktur, pemerintah juga bertugas memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat atau biasa disebut dengan pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan pengadaan barang

dan jasa publik yang menyangkut hajat hidup orang banyak serta pelayanan administrasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam penelitian ini penyelenggara pelayanan publik adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan, yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat serta menyediakan infrastruktur jalan serta pengairan (irigasi).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diketahui bahwa jumlah jalan khususnya jalan kabupaten selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Sebagian jalan yang ada di Kabupaten Kendal pun sudah menggunakan aspal. Di beberapa tempat jalan yang ada sudah ditingkatkan menggunakan hotmix, namun di beberapa daerah jalan yang ada belum mengalami peningkatan yaitu masih mengunakan tanah dan krikil.

Kenaikkan jumlah jalan tidak sebanding dengan kondisi jalan yang ada, walaupun sebagian besar sudah menggunakan aspal namun yang terjadi banyak kerusakan pada jalan-jalan tersebut. Peningkatan jalan hanya terjadi pada tahun 2008 yaitu sepanjang 172.643 Km, namun penurunan kondisi jalan baik terjadi tiap tahunnya dengan rata-rata penurunan sepanjang 64.797 Km. Untuk pengairan hanya jenis tersier saja yang mengalami kenaikkan, sedangkan jenis primer dan sekunder cenderung mengalami penurunan.

Perbandingan kondisi jalan aspal dan jalan tanah yang ada di Kabupaten Kendal adalah terjadi kenaikan pertahun untuk jalan aspal dengan rata-rata kenaikkan sepanjang 67.601 Km. Jalan tanah terjadi penurunan dengan panjang rata-rata 25.1 Km pertahun. Perbandingan jalan kondisi baik dan kondisi jalan

rusak berat adalah terjadi penurunan kondisi jalan baik dengan panjang rata-rata 64.797 Km pertahun. Kondisi jalan rusak berat adalah terjadi kenaikkan dengan panjang rata-rata 37.226 Km pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikkan jalan aspal dan penurunan jalan tanah tidak diimbangi dengan kondisi jalan yang ada karena jalan kondisi baik tiap tahunnya malah mengalami penurunan. Berarti masih perlu adanya perbaikkan dari Dinas Bina Marga dan Pengairan agar pada tahun-tahun berikutnya kenaikkan jumlah (kuantitas) jalan dapat seimbang dengan kenaikkan mutu (kualitas) jalan di Kabupaten Kendal.

Pada tahun 2009 diperkirakan panjang jalan kabupaten di Kabupaten Kendal akan bertambah, pertambahan tersebut sesuai dengan pertambahan jalan kondisi baik yang juga mengalami peningkatan, sedangkan kondisi jalan rusak berat tahun 2009 mengalami penurunan. Pertambahan panjang jalan dan kondisi jalan tidak sesuai dengan jalan aspal, jalan aspal pada tahun 2009 diperkirakan akan mengalami penurunan, sedangkan jalan kerikil malah akan terus mengalami kenaikkan. Pada tahun 2010 panjang jalan kabupaten diperkirakan akan menurun jika dilihat dari tahun 2009. Penurunan jumlah tersebut juga diikuti oleh jalan kondisi baik, namun kondisi jalan rusak berat dan jalan aspal akan meningkat jumlahnya pada tahun 2010.

Perbandingan pengairan yang ada yaitu terjadi perubahan pada pengairan jenis primer dengan panjang rata-rata 27.191 M pertahun. Pengairan jenis sekunder terjadi perubahan dengan panjang rata-rata 20.751 M pertahun. Pengairan jenis tersier terjadi perubahan dengan panjang rata-rata 19.885 M pertahun. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peubahan pengairan dengan rata-rata sama.

Pengairan untuk jenis primer dan tersier pada tahun 2009 dan 2010 diperkirakan akan mengalami kenaikkan, namun pengairan jenis sekunder pada tahun 2009 dan 2010 malah akan mengalami penurunan. Pengairan di Kabupaten Kendal apabila dilihat dari perkiraan pada tahun 2009 dan 2010 diharapkan pada tahun-tahun berikutnya tidak hanya jenis primer dan tersier yang mengalami kenaikkan, namun pengairan jenis sekunder diharapkan juga dapat meningkat.

Perkiraan tersebut diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah yang berhubungan dengan kondisi jalan dan pengairan. Pertambahan jumlah jalan dan pengairan (kuantitas) yang terjadi diharapkan juga akan menambah kualitas atau mutu jalan dan pengairan yang ada sehingga kondisi jalan rusak akan berkurang jumlahnya dan suatu saat jalan yang ada di Kabupaten Kendal tidak akan ditemukan lagi jalan rusak. Jalan aspal juga diharapkan tiap tahunnya dapat meningkat jumlahnya sehingga semua jalan yang ada di Kabupaten Kendal dapat ditingkatkan kualitasnya.

PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1). Jalan dan pengairan yang ada di Kabupaten Kendal selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan dalam jumlah (kualtitas).

2). Jalan di Kabupaten Kendal sebagian besar sudah menggunakan aspal, dengan kenaikkan rata-rata pertahun 67.601 Km, namun kondisi jalan yang ada banyak mengalami kerusakan, penurunan kualitas ini panjang rata-rata pertahunnya adalah 64.797 Km.

3). Pengairan jenis primer dan sekunder selama tiga tahun terakhir mengalami jumlah naik turun, namun pengairan jenis tersier selalu mengalami peningkatan jumlah tiap tahunnya.

4). Anggaran untuk pembiayaan pelaksanaan tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan tiap tahunnya bersumber dari APBD Kabupaten dengan jumlah rata-rata 7.063 % dari total pengeluaran pemerintah. Pembiayaan untuk Dinas Bina Marga dan Pengairan termasuk dalam belanja pelayanan publik di bidang belanja operasi dan pemeliharaan.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan di atas, saran-saran yang dapat diberikan adalah :

1). Ketersediaan sarana prasarana khususnya jalan serta pengairan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan dari segi kuantitas dirasa sudah maksimal namun dari kualitas lebih ditingkatkan lagi, misalnya pemerintah bekerjasama dengan lembaga keuangan atau dengan sektor swasta yang secara khusus menangani infrastruktur sehingga hasilnya akan lebih maksimal karena jalan merupakan infrastruktur yang selalu digunakan masyarakat sehari-hari.

2). Dinas Bina Marga dan Pengairan lebih respon terhadap kondisi jalan dan pengairan yang tiap tahun semakin memburuk yaitu dengan tanggap situasi, penanganan dini, mengikuti perkembangan perharinya dan mempunyai dana cadangan sendiri untuk menangani masalah yang sifatnya mendadak agar jalan dan pengairan lebih cepat mendapatkan penanganan karena jalan yang baik akan membantu meningkatkan roda perekonomian.

PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

----------. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

BPS Kabupaten Kendal.

Denhardt, RB and KG. Denhardt. 2000. *Public Administration and The Critique of Domination, Administration and Society.* 11 (1) : 107-20

Irawan dan Suparmoko. 1992. E*konomika Pembangunan.* Yogyakarta : BPFE.

Jatmiko, Sidik. 2001. *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Bigraf Publishing.

Khusaini, Muhammad. 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daeah.* Malang : BPFE Unibraw.

Mangkusubroto, Guritno. 1993. *Ekonomi Publik.* Yogyakarta : BPFE.

Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta : Andi.

Nasir, Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia.

Pressman, Steven. 2000. *Lima Puluh Pemikir Ekonomi Dunia*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

Rochani, A. Hamam. 2003. *Membangun dan Memberdayakan Potensi Otonomi : Refleksi 375 Tahun Kabupaten Kendal*. Semarang : Prima Madia Mandiri.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. 2001. *Ilmu Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Media Global Edukasi.

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.

Suparmoko. 2001. *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta : Andi.

Suryana. 2000. *Ekonomi Pembangunan Problematika dan Pendekatan.* Jakarta: Salemba Empat.

Syarifudin, Ateng. 1985. *Pasang Surut Otonomi Daerah*. Jakarta : Bima Cipta.

The World Bank. 2006. *Laporan pembangunan Dunia 2006.* Jakarta: Salemba Empat.

PERPUSTAKAAN UNNES

Umar, Husein. 2002. *Metode Riset Komunikasi Organisasi*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Wijaya, HAW. 2002 *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.

http://www.kabupaten-kendal.go.id/otonomi

http://triadmojo.wordpress.com/2008/01/12

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES